

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abrar Saleng (1), 2004, Hukum Pertambangan, cet. 1, Yogyakarta: UII Press.

Azmi Fendri, 2016, Pasang surut pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah:  
Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara, Jakarta:  
RajaGrafindo Persada.

Aminuddin, 2010, Hukum Penanaman Modal, Jakarta: kencana.

A.R. Soehoed, 2005, Membangun Tambang di Ujung Dunia: Sejarah  
Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua,  
Jilid 1, Jakarta Aksara Karunia

Denise Leith, 2003, The Politic of Power: Freeport in Soeharto's Indonesia,  
University of Hawaii Press.

Erman Rajagukguk, 1994, Indonesianisasi Saham, Jakarta: Rineka Cipta.

Fred N Kerlinger, 1990, Asas-asas Penelitian Behavioral, Yogyakarta Gadjah Mada  
University Press

Haryanto. D, 2001, Peluang dan Tantangan Sektor Pertambangan Dalam Era  
Otonomi Daerah, Yogyakarta UPN"Veteran"Yogyakarta Press.

Hertanto, 2008, Aspek-Aspek Hukum Pasca Berakhirnya Kontrak Karya, Jakarta:  
Rizkita.

Henry Campbell Black, 1978, *Black's Law Dictionary*, Amerika Serikat West  
Publishing Co.

Ilmar, Aminuddin, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta:  
Kencana.

---

- Jeremy Bentham, 2006, *The Theory of Legislation (Teori Perundang-undangan)*,  
Diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A., Bandung: Nusantara & Nuansa.
- John W. Head, 2002, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Elips.
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standar): Perkembangannya  
di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif  
dan Empiris*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasaruddin, M Irsan dan Surya Indra, 2007, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*,  
Jakarta: Kencana.
- Nathan Machmud, Tengku, 2000, *The Indonesian Production Sharing Contract (An  
Investor's Perspective)*, The Netherlands: Kluwer Law International.
- PN.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim HS, H dan Nurbani Erlies Septina, 2013, *Hukum Divestasi Indonesia (Pasca  
Putusan Mahkamah Konstitusi RI)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di  
Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim HS (1), H, 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo  
Persada.
- Soehoed, A.R, 2005, *Membangun Tambang di Ujung Dunia (Sejarah  
Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua)*,  
Jakarta: Aksara Karunia.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI Press.
- Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
-

- Sajuti Thalib, 1974, *Hukum Pertambangan Indonesia, cet. 2*, Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan.
- Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan, cet.2*, Jakarta: Sinar Grafidi.
- Salim HS (2), 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, Jakarta RajaGrafindo Persada.
- Simon Felix Sembiring, 2009, *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirnya Berkah untuk Anak Bangsa*, Jakarta: ElexMedia Komputindo.
- Sally Wehmeier, dkk., 2000, *Oxford Adanced Learner's Dictionary ofCurrent English*, Amerika Serikat Oxford University Press.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Salim HS, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sally Wehmeier, dkk., 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Amerika Serikat: Oxford University Opress.
- Tayana Sunandar, 2004, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengkete Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- W. Friedman, 1990, *Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum) (Susunan I, II, dan II)*. Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Jakarta Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika.
-

## ARTIKEL INTERNET

SIAR, “Potensi Pertambangan di Indonesia”,  
[http://siar.com/Potensi Pertambangan di Indonesia/](http://siar.com/Potensi_Pertambangan_di_Indonesia/) , diunduh tanggal 10  
 Oktober 2018

Berita Satu, “Potensi dan Tantangan Pertambangan di Indonesia”,  
[http://id.beritasatu.com/home/potensi-dan-tantangan-pertambangan-di-  
 indonesia/84998](http://id.beritasatu.com/home/potensi-dan-tantangan-pertambangan-di-indonesia/84998) diunduh pada tanggal 10 Oktober 2018

IDN TIMES, [https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-fofia/memahami-  
 sejarah-panjang-kontrak-freeport-di-indonesia/full](https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-fofia/memahami-sejarah-panjang-kontrak-freeport-di-indonesia/full), diunduh tanggal 10  
 Oktober 2018.

PT.Freeport Indonesia, “Pengembangan Masyarakat”  
[https://ptfi.co.id/site/uploads/images/5bbeca68608e2-5966fbf419230-  
 pengembangan-masyarakat-freeportindonesia-1.pdf](https://ptfi.co.id/site/uploads/images/5bbeca68608e2-5966fbf419230-pengembangan-masyarakat-freeportindonesia-1.pdf) diunduh pada tanggal  
 10 November 2018.

PT.Freeport Indonesia, “Penggunaan Barang dan Jasa dalam Negeri”,  
[https://ptfi.co.id/site/uploads/images/5bbecf1720d4a-5ac5cf5eb9339-  
 pengadaan-barang.pdf](https://ptfi.co.id/site/uploads/images/5bbecf1720d4a-5ac5cf5eb9339-pengadaan-barang.pdf) diunduh pada tanggal 10 November 2018.

Mengenal Jenis Izin Tambang di Indonesia”, [http://belajarhukum.net/mengenal-  
 jenis-izin-tambang-di-indonesia/](http://belajarhukum.net/mengenal-jenis-izin-tambang-di-indonesia/) diunduh pada tanggal 16 Desember 2018  
[https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-fofia/memahami-sejarah-  
 panjang-kontrak- freeport-di-indonesia/full](https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-fofia/memahami-sejarah-panjang-kontrak-freeport-di-indonesia/full) diunduh pada tanggal 16  
 Desember 2018 pada pukul 13.40 WIB.

---

Freeport setuju renegotiasi kontrak, merdeka, <https://m.merdeka.com/piala-dunia/freeport-setuju-renegosiasi-kontrak.html> diunduh pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 17.05 WIB

## **SEMINAR/JURNAL**

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2009, *Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa: Sejarah Perkembangan dan Energi Indonesia*, Jakarta

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Keputusan Menteri tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Kepmen ESDM No.1614 Tahun 2004.

Tanggapan Ketua Umum Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Irwandy Arif dalam pers yang dikutip dari media Detik, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1056286/mengintip-isi-uu-minerba-> diunduh pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 15.55 WIB

Hikmahanto Juwana, *Seminar Hukum Online: Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Paca Disahkannya UU Minerba*, Jakarta, pada tanggal 21 Januari 2009

---

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pertambangan

Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-  
undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan,  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Pasal  
1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.  
183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap  
Investasi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham  
dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham  
dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

---

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia, 1991, *Kontrak Karya*, Jakarta.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abrar Saleng (1), 2004, Hukum Pertambangan, cet. 1, Yogyakarta: UII Press.
- Azmi Fendri, 2016, Pasang surut pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah: Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Aminuddin, 2010, Hukum Penanaman Modal, Jakarta: kencana.
- A.R. Soehoed, 2005, Membangun Tambang di Ujung Dunia: Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua, Jilid 1, Jakarta Aksara Karunia
- Denise Leith, 2003, The Politic of Power: Freeport in Soeharto's Indonesia, University of Hawaii Press.
- Erman Rajagukguk, 1994, Indonesianisasi Saham, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fred N Kerlinger, 1990, Asas-asas Penelitian Behavioral, Yogyakarta Gadjah Mada University Press
- Haryanto. D, 2001, Peluang dan Tantangan Sektor Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah, Yogyakarta UPN"Veteran"Yogyakarta Press.
- Hertanto, 2008, Aspek-Aspek Hukum Pasca Berakhirnya Kontrak Karya, Jakarta: Rizkita.
- Henry Campbell Black, 1978, *Black's Law Dictionary*, Amerika Serikat West Publishing Co.
- Ilmar, Aminuddin, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Jeremy Bentham, 2006, The Theory of Legislation (Teori Perundang-undangan), Diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A., Bandung: Nusantara & Nuansa.
- John W. Head, 2002, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Jakarta: Elips.
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, Perjanjian Baku (Standar): Perkembangannya di Indonesia, Bandung: Alumni.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasaruddin, M Irsan dan Surya Indra, 2007, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Nathan Machmud, Tengku, 2000, The Indonesian Production Sharing Contract (An Investor's Perspective), The Netherlands: Kluwer Law International.
- PN.H Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim HS, H dan Nurbani Erlies Septina, 2013, Hukum Divestasi Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI), Jakarta: Rajawali Pers.
- Supramono, Gatot, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim HS (1), H, 2007, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: PT Grafindo Persada.



- Soehoed, A.R, 2005, Membangun Tambang di Ujung Dunia (Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua), Jakarta: Aksara Karunia.
- Soekanto, Soerjono, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Depok: UI Press.
- Soehino, 1980, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty.
- Sajuti Thalib, 1974, Hukum Pertambangan Indonesia, cet. 2, Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan.
- Sutedi, 2012, Hukum Pertambangan, cet.2, Jakarta: Sinar Grafidi.
- Salim HS (2), 2005, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara, Jakarta RajaGrafindo Persada.
- Simon Felix Sembiring, 2009, Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirnya Berkah untuk Anak Bangsa, Jakarta: ElexMedia Komputindo.
- Sally Wehmeier, dkk., 2000, Oxford Adanced Learner's Dictionary of Current English, Amerika Serikat Oxford University Press.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Salim HS, 2004, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sally Wehmeier, dkk., 2000, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Amerika Serikat: Oxford University Opress.
- Taryana Sunandar, 2004, Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 122
- W. Friedman, 1990, Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum) (Susunan I, II, dan II). Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Jakarta Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.

## ARTIKEL INTERNET

- SIAR, "Potensi Pertambangan di Indonesia", [http://siar.com/Potensi\\_Pertambangan\\_di\\_Indonesia/](http://siar.com/Potensi_Pertambangan_di_Indonesia/) , diunduh tanggal 10 Oktober 2018
- Berita Satu, "Potensi dan Tantangan Pertambangan di Indonesia", <http://id.beritasatu.com/home/potensi-dan-tantangan-pertambangan-di-indonesia/84998> diunduh pada tanggal 10 Oktober 2018
- IDN TIMES, <https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-fofia/memahami-sejarah-panjang-kontrak-freeport-di-indonesia/full>, diunduh tanggal 10 Oktober 2018.
- PT.Freeport Indonesia, "Pengembangan Masyarakat" <https://ptfi.co.id/site/uploads/images/5bbe6a68608e2-5966fbf419230-pengembangan-masyarakat-freeportindonesia-1.pdf> diunduh pada tanggal 10 November 2018.

PT.Freeport Indonesia, “Penggunaan Barang dan Jasa dalam Negeri”, <https://ptfi.co.id/site/uploads/images/5bbe1720d4a-5ac5cf5eb9339-pengadaan-barang.pdf> diunduh pada tanggal 10 November 2018.

Mengenal Jenis Izin Tambang di Indonesia”, <http://belajarhukum.net/mengenal-jenis-izin-tambang-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 16 Desember 2018

<https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-folia/memahami-sejarah-panjang-kontrak-freeport-di-indonesia/full> diunduh pada tanggal 16 Desember 2018 pada pukul 13.40 WIB.

Freeport setuju renegotiasi kontrak, merdeka, <https://m.merdeka.com/piala-dunia/freeport-setuju-renegosiasi-kontrak.html> diunduh pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 17.05 WIB

## **SEMINAR**

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2009, *Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa: Sejarah Perkembangan dan Energi Indonesia*, Jakarta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Keputusan Menteri tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Kepmen ESDM No.1614 Tahun 2004.

Tanggapan Ketua Umum Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Irwandy Arif dalam pers yang dikutip dari media Detik, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1056286/mengintip-isi-uu-minerba> diunduh pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 15.55 WIB

Hikmahanto Juwana, *Seminar Hukum Online: Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pada Disahkannya UU Minerba*, Jakarta, pada tanggal 21 Januari 2009

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia, 1991, *Kontrak Karya*, Jakarta.